

**EKSISTENSI KUHP DAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TERHADAP
TINDAK PIDANA ABORSI DI MAKASSAR
(Analisis Yuridis dan Sosiologis)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH), Jurusan Ilmu Hukum

pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh

DWI NUR AMAR MA'RUF ASSE
NIM. 10600106024

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penyusun skripsi yang berjudul Eksistensi KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Makassar (Analisis Yuridis dan Sosiologis) menyatakan dengan sungguh dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 November 2010

Penyusun.

Dwi Nur Amar Ma'ruf Asse
NIM: 10600106024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Eksistensi KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Makassar (Analisis Yuridis dan Sosiologis),” yang disusun oleh Dwi Nur Amar Ma’ruf Asse, NIM: 10600106024, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010 M, bertepatan dengan 2 Muharram 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum.

Makassar, 8 Desember 2010 M.
2 Muharram 1431H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Drs. M. Tahir Maloko, M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Istiqamah, SH., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Hamsir, SH., M.Hum.	(.....)
Pembimbing II	: H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 195810221987031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Dwi Nur Amar Ma'ruf Asse**, NIM: 10600106024, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Eksistensi KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Makassar (Analisis Yuridis dan Sosiologis),” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 13 November 2010.

Pembimbing I

Pembimbing II

Hamsir, S.H., M.Hum.
NIP: 196104041993031005

H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI.
NIP: 197708012003121002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamiin, tiada kata yang indah terlafadzkan, selain ungkapan rasa syukur penyusun, yang tiada terhingga atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah swt. terutamanya nikmat ilmu, serta segala pertolongan dan kemudahan yang senantiasa Dia anugerahkan, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Eksistensi KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Analisis Yuridis dan Sosiologis)”** dapat terselesaikan. Haturan shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad saw. yang telah merealisasikan Islam di jagad semesta ini sebagai Islam *rahmatan lil alamin*.

Berbagai hambatan dan kendala penyusun dapatkan, pada akhirnya terlahui juga dan semua itu menjadi hikmah atas usaha keras penyusun dalam penulisan skripsi ini. Tidak luput juga, bimbingan, arahan, bantuan fasilitas, dan dukungan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penyusun. Untuk itu, perkenankanlah penyusun dengan segala ketulusan hati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut:

1. Orangtua penyusun: Ayahanda Sunandar dan Ibunda Murniati. Dengan bersimpuh lutut ananda haturkan ungkapan terima kasih atas segala kasih sayang, didikan, pengorbanan, dorongan, kepercayaan, dukungan moral dan materil selama ini, serta do'a dalam sujud yang senantiasa menyertai setiap langkah penyusun dalam menapaki altar dan belantika hidup penyusun selama dirantauan pendidikan. Semoga rahmat Allah swt. senantiasa tercurah pada kalian hingga akhir kelak.

2. Kakak dan adik penyusun: Hasnawati dan Sahriani, salam sayang dan terima kasih atas segala hal yang kalian berikan selama ini. Kalian adalah anugerah terindah yang penyusun miliki dalam hidup ini.
3. Paman dan Bibi penyusun: Ahmad Saguni dan Maksupa, Muh. Kasim dan Nuraeni, serta Nuraedah, terima kasih atas dukungannya baik itu berupa materi maupun non materi yang diberikan kepada penyusun, semoga dengan selesainya studi penyusun dapat memberi arti dan kebanggaan tersendiri buat semua keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan Jajaran Pembantu Rektor beserta seluruh staf.
5. Bapak Hamsir, S.H., M.Hum dan H. Abd. Wahid Haddade, Lc., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag dan Ibu Istiqamah, SH., M.H., selaku tim penguji. Terima kasih atas segala arahan, bimbingan, saran, dan kritiknya yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Hamsir, S.H., M.Hum dan Ibu Istiqamah, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa mendidik penyusun beserta rekan-rekan mahasiswa di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar.
8. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Bapak dan Ibu dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum terutama dosen Jurusan Ilmu Hukum yang telah mentransformasikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penyusun.

9. Ibu Istiqamah, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan segudang nasehat dan solusi selama proses berjalannya studi penyusun di UIN Alauddin Makassar.
10. Seluruh Staf Administrasi dalam lingkup Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang telah banyak membantu proses teknis selama penyusun melakukan studi.
11. Bapak Direktur RSUD Kota Makassar (Rumah Sakit Daya), beserta seluruh staf administrasi dalam lingkup RSUD Makassar, terima kasih atas bantuan dan arahnya selama penyusun melakukan penelitian atas penulisan skripsi ini.
12. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, serta seluruh Staf Administrasi dalam lingkup Pengadilan Negeri Makassar, terima kasih atas bantuan dan arahnya selama proses penelitian berlangsung guna penulisan skripsi ini.
13. Kekasih Penyusun, Masdawati yang selalu memberi semangat, keindahan, dan kebahagiaan sampai saat ini. Terima kasih atas kesabaran dan kesetiiaannya.
14. Kanda Sahabat: Munawwir Arafat S.Pd.I., Suaib Amin Prawono, Muh. Idris S.Pd.I., Muh. Sabran, dan Asriyadi. Terima kasih atas pencerahan wacana dan kontribusi pemikirannya kepada penulis.
15. Sahabat karib penyusun: Abdul Rahman, Sukri, Suardi, Fitrawansyah, Muhiddin, Firman, Darmawangsyah, Jufri Derwotubun, Ahmad Tawakkal, Rahmat, Heril, Muh. Hasrul. Muh. Syarif dan Asriawan. Terima kasih atas dorongan, kepercayaan, dan dukungan selama ini. Tidak lupa pula Farid Abuhairah (*alm.*) sosok sahabat yang mengajari penyusun tentang arti persaudaraan, kesetiakawanan. Dalam do'a penyusun, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah swt.

16. Teman-teman di Jurusan Ilmu Hukum yang tidak sempat penyusun sebut satu persatu, terima kasih atas bantuan, perhatian, motifasi, dan semangat yang diberikan, serta terima kasih untuk kebersamaan yang indah selama ini.
17. Teman-teman KKN: Asriadi, Suparman, Ahmad Suyono, Abdillah, Muktadir, Amalia, Ahdina, Aisyah, dan Rosdiana (posko UIN Alauddin Makassar). Tidak lupa pula Nursyaidah, Andi Eva Arnas, Juju', Kiki', Marlianti, Mutmainna, Eli Septiani, Nina, Taufik dan Arif (posko STIKES Mega Rezky Makassar), terima kasih atas buah kenangan, solidaritas dan kolektifitas selama di Desa Belabori.
18. Semua pihak yang tak sempat penyusun sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuannya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Segala bantuan yang telah disumbangkan tidak dapat penulis balas. Hanya Allah swt. jualah yang dapat membalas sesuai dengan amal dan sumbangsih Bapak, Ibu, Sahabat dan Sahabatwati dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Akhirnya, penyusun menyadari sebagai insan biasa, tanpa menafikkan kekhilafan, kekeliruan dan kelupaan, bilamana hal itu ternyata terdapat dalam penulisan skripsi ini, baik redaksi kalimat maupun yang lainnya, penyusun memohon ma'af yang sebesar-besarnya atas keterbatasan diri penyusun. Saran dan kritikan yang bersifat solutif dan transformatif, sangat penyusun harapkan sebagai dialektika, dinamika, dan paradioksitas ilmu pengetahuan.

Makassar, 1 November 2010

Penyusun.

DAFTAR ISI


JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-13
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	10
C. Hipotesis	10
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
F. Garis-garis Besar Isi	13
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	14-41
A. Pengertian Aborsi dan Macam-Macam Aborsi	14
B. Metode Abortus dan Alasan-Alasan Aborsi	18
C. Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	21
D. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Aborsi dan Sanksi Hukum Pelaku Abortus Provokatus	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42-44
A. Populasi dan Sampel	42
B. Metode Pendekatan	42
C. Instrumen Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	45-59








A. Fenomena Aborsi Di Makassar	45
B. Eksistensi KUHP dan UU. No. 36 Tahun 2009 Terhadap Aborsi Di Makassar	48
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Aborsi Di Makassar	54
BAB V PENUTUP	60-61
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62-65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENYUSUN	

DAFTAR TABEL

A. Tabel Perkara Aborsi Tahun 2005 di Pengadilan Negeri Makassar	50
B. Tabel Perkara Aborsi Tahun 2006 di Pengadilan Negeri Makassar	51
C. Tabel Perkara Aborsi Tahun 2007 di Pengadilan Negeri Makassar	51
D. Tabel Perkara Aborsi Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Makassar	51
E. Tabel Perkara Aborsi Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar	52

DAFTAR TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	be
	ta	t	te
	sa	s	es (tidak dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	al		zet (dengan titik di atas)
	ra	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	apostrof terbalik
	gain	g	ge
	fa	f	ef

	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wau	w	we
	ha	h	ha
	hamzah	,	apostrof
	ya	y	ye

ABSTRAK

NAMA : Dwi Nur Amar Ma'ruf Asse
Nim : 10600106024
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Eksistensi KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Analisis Yuridis dan Sosiologis)

Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis mengenai: (1) konstruksi hukum tentang aborsi; (2) fenomena aborsi di Makassar; dan (3) Faktor-faktor yang melatari terjadinya aborsi di Makassar.

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis didasarkan pada aspek peraturan-peraturan hukum positif seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan juga menggunakan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan sosiolaogis dengan mengamati fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat Makassar khususnya praktik aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum yang mengatur tentang aborsi dan mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya aborsi di Makassar.

Jenis penelitian adalah kajian pustaka dan lapangan. Tinjauan pustaka yakni mengkaji dan mengangkat hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan dari berbagai buku sebagai referensi atau penadapat para pakar. Tinjauan lapangan yakni dengan survey langsung ke obyek penelitian. Sumber data adalah beberapa informan yang terdiri dari dua instansi terkait yakni Pengadilan Negeri Makassar dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar (Rumah Sakit Daya), serta mewawancarai orang-orang yang terkait aborsi (melakukan aborsi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) eksistensi KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 terhadap tindak pidana aborsi ialah yang menjadi dasar putusan hakim dalam mengadili kasus aborsi adalah KUHP bukan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan; (2) fenomena aborsi di Makassar begitu marak, akan tetapi hanya sedikit yang disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar; (3) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi di Makassar kebanyakan karena akibat pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah.

Implikasi dan saran dari penelitian ini yakni: (1) diharapkan konstruksi hukum yang mengatur tentang aborsi hendaknya mengatur lebih jelas, tegas dan penerapan hukumnya lebih bersifat implementatif dan lebih sosialitatif (2) hendaknya generasi muda memaknai dan memahami pergaulan yang bersifat positif, dalam arti tetap membatasi kebebasan bergaul yang dapat menimbulkan dampak negatif akibat pergaulan bebas itu. Lebih dalam lagi hendaknya masyarakat memahami dan menempatkan pemahaman tentang Agama Islam sebagai *instrument* moral dalam kehidupan berkeluarga, bukan menjadikan aborsi sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan, karena jelas dalam Al-Qur'an, Allah melarang membunuh anak karena takut miskin dan agama mengajarkan bahwa anak adalah kekayaan yang paling berharga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia khususnya bagian timur. Makassar kini mengalami metropolitanisme, akan tetapi kehidupan modern telah menggiring interaksi sosial ke arah tanpa batas (*free interaction*). Masyarakat yang terkesima dengan gelamornya zaman modern abai terhadap kaidah-kaidah sosial dan norma-norma agama, serta hukum yang berlaku. Gaya hidup hedonisme dan eskapistisme menjadi sebuah pencitraan dan *neo*-kultur yang secara bersamaan semua itu harus terbayar mahal dengan degradasi generasi muda dan hal ini akan melatari terjadinya tindakan kriminal, misalnya pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya yang kerap berujung pada tindakan aborsi.

Dimasa sekarang ini hamil di luar nikah sering terjadi, khususnya di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan anak muda zaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup seks bebas (*free sex*). Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka berani melakukan hubungan seksual pranikah. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut. Namun tidak jarang pula ada yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung

tersebut mempunyai ayah. Perkawinan ini dalam istilah anak muda dikenal dengan nama *married by accident* (MBA) atau nikah setelah hamil dahulu¹.

Fenomena aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah dari Allah swt. sebagai Sang Pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena disatu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu. Seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan

¹Herwanto, *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*, Pikiran Rakyat: Jakarta, 20 Desember 1997, h. 11

kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa dan tindakan kriminal sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

Kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasikan menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.

Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provocatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil di luar nikah) atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu mencengangkan dan sangat memprihatinkan. Data World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman.²

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan

²Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), h. 224.

kandungannya akan dihukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. Akan tetapi dilain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila anak tersebut terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan yang layak, sedangkan apabila anak itu lahir tanpa ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini dikarenakan dalam budaya timur dan hukum Islam di Indonesia, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang kadang-kadang membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat menggugurkan kandungannya. Padahal pengguguran (aborsi) sama halnya dengan pembunuhan, karena menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifahan di muka bumi ini.³

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan melakukan aborsi menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum di Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe*

³M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Cet. I Jakarta: Mizan, 2007), h. 287.

abortion). Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi.

Dilain pihak *prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar lebih dari itu juga merupakan tindak pidana. Oleh karena itu para penganut paham *prolife* ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi banyak pula yang bukan agamawan tetapi memiliki pandangan *prolife*.

Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan aborsi dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Akan tetapi walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat diketahui dari data-data yang diajukan oleh para peneliti tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi harus dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, karena walaupun dari penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menunjukan bahwa daerah-daerah yang banyak terjadi tindak pidana aborsi adalah daerah-daerah atau kota-kota yang disebut dengan daerah pendidikan atau kota besar di Indonesia, misalnya Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Manado dan Makassar.

Kota-kota tersebut adalah kota-kota yang disebut sebagai kota pelajar yang menjadi tujuan menimba ilmu pengetahuan. Dari sejumlah pelajar diberbagai provinsi yang juga tidak lepas dari fenomena maraknya aborsi. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu banyaknya ditemukan kasus aborsi yang dilakukan para remaja yang belum menikah. Ironisnya para remaja tersebut pada umumnya merupakan pelajar dan mahasiswa yang datang dengan tujuan sekolah. Jadi mereka telah menyalahgunakan kesempatan belajar mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar susila sehingga mengakibatkan kehamilan.

Selain kenyataan yang langsung dijumpai dalam masyarakat, banyak pula berita-berita aborsi di surat kabar dan televisi yang mengungkap kasus-kasus aborsi. Berita-berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan bekas aborsinya saja, antara lain janin yang ditinggalkan begitu saja setelah selesai diaborsi.⁴ Ada juga janin yang sengaja ditinggalkan di depan rumah penduduk atau di depan lembaga sosial (yayasan).

Berita-berita ini cukup meresahkan berbagai kalangan masyarakat, khususnya para orang tua yang mempunyai anak yang sedang bersekolah di kota-kota tersebut, karena berita-berita itu membuat para orang tua khawatir bahwa anaknya juga melakukan hal yang sama, apalagi jika remaja tersebut tidak mendapatkan pengawasan langsung dari orang tuanya. Kalaupun anak yang bersangkutan tidak melakukan hal tersebut, tetapi situasi pergaulan yang bebas di sekitarnya sedikit banyak akan mempengaruhi pola pikir anak.

Sejalan dengan keprihatinan masyarakat tentang maraknya aborsi, sekarang ini jasa aborsi juga semakin marak dipromosikan kepada mereka yang membutuhkan,

⁴Wati, *Aborsi di Indonesia*, Suara Merdeka, 27 Februari 2000, h. 8.

meskipun hal ini dilakukan secara terselubung agar sulit diketahui keberadaannya oleh aparat penegak hukum. Baik itu melalui jasa dukun kampung dengan ramuan-ramuan tradisionalnya maupun melalui jasa medis dengan obat-obatannya yang kadang ditemukan di apotik dan toko obat lainnya. Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat, membuat masyarakat menjadi resah dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk dapat menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan dibutuhkan penegakan hukum. Walaupun fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sampai sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku.

Kembali meninjau aborsi dari perspektif hukum, permasalahan awal yang perlu dibahas disini ini adalah sebab-sebab mengapa aborsi tersebut harus dilakukan. Aborsi yang terjadi karena adanya kelainan-kelainan yang dialami oleh perempuan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksinya (aborsi spontan). Jenis aborsi ini dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) maupun dari perspektif hukum sama sekali tidak menimbulkan permasalahan. Permasalahan akan muncul apabila menyangkut aborsi provokatus dimana terjadi aborsi yang dilakukan dengan sengaja. Seorang perempuan yang terpaksa harus melakukan aborsi karena keputusan medis. Pengakhiran kehamilan harus dilakukan karena alasan bahwa kehamilan yang terjadi membahayakan ibunya atau alasan kondisi janin cacat (*aborsi provokatus terapeutikus*). Seorang perempuan tidak mampu mempertahankan kehamilannya karena adanya vonis dari dokter terhadap kesehatan dan keselamatan nyawanya ataupun bayinya. Jenis aborsi ini

secara hukum dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Ada beberapa hal yang dapat dicermati dari jenis aborsi ini yaitu, bahwa ternyata aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan adanya pertimbangan medis. Dalam hal ini berarti dokter atau tenaga kesehatan mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 Tahun 2009. Pada pasal 75 ayat (2, 3), dan pasal 76, tindakan medis (aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan setelah meminta persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau keluarganya untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Hal tersebut berarti bahwa apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Dengan kata lain vonis medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan.

Berbeda halnya dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 75 ayat (2, 3) dan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, aborsi jenis ini disebut dengan aborsi *provokatus kriminalis*. Artinya bahwa tindakan aborsi seperti ini dikatakan tindakan ilegal atau tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi seperti ini dikatakan sebagai tindakan

pidana atau kejahatan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Agar dapat membahas secara detail dan cermat mengenai aborsi provokatus kriminalis, kiranya perlu diketahui bagaimana konstruksi hukum yang berkaitan dengan tindakan aborsi sebagai kejahatan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka berarti bahwa apapun alasannya, di luar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Jika mencermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subyek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Juga apabila dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan kata lain paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mengedepankan hak anak (*prolife*). Oleh karena itu dalam KUHP, tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Adapun yang dapat dikenakan sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat. Persoalannya adalah bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditegakkan dengan baik sehingga dapat menjerakan dan meminimalisir para pelaku kejahatan aborsi tersebut.

Persoalan lain yang cukup penting untuk dipikirkan adalah aborsi apabila ditinjau dari prespektif hak perempuan terhadap alat reproduksi yang merupakan kodrat yang melekat pada setiap perempuan. Apabila secara normatif hak anak untuk hidup

dilindungi oleh undang-undang sehingga konstruksi hukum menggunakan paradigma *prolife*, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak perempuan terhadap alat reproduksinya, apakah perempuan tidak berhak untuk menentukan atau memutuskan hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi atau yang disebut dengan *prochoice*.

Membahas persoalan aborsi di Indonesia dikaitkan dengan profesi medis atau dunia kedokteran serta dunia hukum, sepertinya belum ada titik terang dalam sistem penegakan hukum. Dunia hukum seakan menutup mata atas persoalan ini sekaligus diperparah lagi oleh dunia kedokteran yang seolah-olah menyelubungi praktek-praktek aborsi yang nyata-nyata bertentangan dengan sumpah jabatan atau profesi kedokteran. Untuk membahas permasalahan tersebut, penelitian ini ingin menelusuri kembali bagaimana sebenarnya kedudukan aborsi dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, implementasi peraturannya dan faktor-faktor yang melatari terjadinya aborsi di Makassar.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana Eksistensi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 terhadap tindak pidana aborsi?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya aborsi di Makassar?

C. Hipotesis

Secara etimologis, hipotesis berarti sesuatu yang masih kurang untuk sebuah kesimpulan pendapat, dengan kata lain hipotesis adalah kesimpulan, tetapi kesimpulan ini belum final, dan masih perlu dibuktikan kebenarannya⁵

⁵Winarno Surahmad, *Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: PN. Tarsito, 1975), h. 58

Setelah penulis merumuskan masalah sebagaimana telah disebutkan di atas, maka lebih lanjut penulis akan mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Adapun hipotesis atau sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang dapat penulis ajukan adalah:

1. Ada dugaan bahwa eksistensi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 belum mengatur secara tegas tentang aborsi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi di kota Makassar diduga karena faktor himpitan keterbatasan ekonomi (kemiskinan) yang mengakibatkan meningkatnya praktek aborsi di Kota Makassar.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami makna yang dimaksudkan dalam skripsi ini, maka perlu diberikan definisi secara operasional mengenai judul, yaitu:

Yang dimaksud dengan eksistensi adalah keberadaan atau kedudukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 sebagai aturan terhadap tindak pidana aborsi dan sebagai dasar hukum terhadap para pelaku aborsi.

Adapun ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai aborsi ditinjau dari perspektif hukum positif berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, tinjauan hukum Islam terhadap aborsi, sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi dan apa yang melatari terjadinya aborsi di Makassar

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 terhadap tindak pidana aborsi dan pelaksanaan peraturannya di Makassar.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi di kota Makassar..

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa/mahasiswi yang berminat untuk mempelajari tindak pidana aborsi dari perpektif hukum positif dan hukum Islam.
2. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat mengkaji tindak pidana aborsi.
3. Dapat menambah pengetahuan, wawasan keilmuan serta memberikan pemahaman khususnya mengenai:
 - a) Eksistensi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 terhadap tindak pidana aborsi di kota Makassar.
 - b) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi di kota Makassar.
4. Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dan penerapan yang lebih sinergis antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 terhadap tindak pidana aborsi di kota Makassar.

F. Garis-garis Besar Isi

Adapun judul skripsi ini adalah “Eksistensi KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Makassar (Analisis Yuridis dan Sosiologis)”. Pembahasannya terdiri atas 5 bab, yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub.

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah; rumusan dan batasan masalah; hipotesis; definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan; kajian pustaka; metode penelitian; tujuan dan kegunaan penelitian; serta garis-garis besar isi.

Bab *kedua*, bab yang mendeskripsikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi: pengertian aborsi dan macam-macam aborsi; metode abortus dan alasan-alasan aborsi; aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum islam (*syar’i*); unsur-unsur pidana aborsi dan sanksi hukum bagi pelaku aborsi.

Bab *ketiga*, adalah bab yang secara khusus membahas tentang metodologi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab *keempat*, merupakan bab inti dari skripsi ini yang membahas tentang Eksistensi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 terhadap tindak pidana aborsi di Makassar dan bagaimana penerapannya hukumnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi di Makassar.

Bab *kelima*, adalah bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian dan Macam-Macam Aborsi

1. Pengertian

Dalam mendefinisikan aborsi, terdapat sejumlah pendapat yang berbeda satu sama lain, diantaranya adalah: *Pertama*, menurut *Fact About Abortion, Info Kit on Woman's Health*, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai usia 20 minggu. *Kedua*, terjadinya keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu.¹

Secara harfiah istilah aborsi berasal dari kata dalam bahasa Inggris *abortion* yang artinya pengguguran kandungan secara sengaja.² Menggugurkan kandungan dalam dunia kedokteran atau dalam bahasa latin dikenal dengan istilah “abortus”. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.³ Dilain pihak istilah aborsi menurut dr. Agus Abadi dari UPF/Lab Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Dr. Soetomo, abortus adalah terhentinya kehidupan buah kehamilan pada usia kehamilan sebelum 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram.

¹Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), h. 225.

²Homby, A. S. & Pamwell, E.C., *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Bentara Antar Asia, 1992), h. 13.

³Widodo, *Aborsi dalam Perdebatan Ulama*, Suara Merdeka: Jakarta, 5 Desember 1997, h. 6.

World Health Organisation (WHO) memperbaharui definisi aborsi yakni terhentinya kehidupan buah kehamilan di bawah 28 minggu atau berat janin kurang dari 1000 gram. Aborsi juga diartikan mengeluarkan atau membuang baik *embrio* atau *fetus* secara prematur (sebelum waktunya). Istilah aborsi disebut juga *abortus provocatus*. Inilah yang belakangan ini menjadi ramai dibicarakan. Abortus yang dilakukan secara sengaja. Jadi Aborsi adalah tindakan pengguguran hasil konsepsi secara sengaja.⁴

Abortion dalam kamus Inggris-Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.⁵ Dalam *Blacks's Law Dictionary*, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti *the spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion*.⁶ Keguguran dengan keluarnya *embrio* atau *fetus* tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan manusia.⁷

Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.⁸

Menurut Eastmen abortus adalah terputusnya suatu kehamilan dimana *fetus* belum sanggup hidup sendiri di luar *uterus*, karena masih dalam usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Sama halnya dengan Jefflot memberikan definisi abortus adalah

⁴Saud Saumiman, "Aborsi, Pro dan Kontra? Bagaimana kita Menjawabnya." www.kabarindonesia.com, 14-Nov-2006, di akses tanggal 11 Juli 2010.

⁵Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 2.

⁶Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary*, (Sixth Edition: St. Paul Min West Publising Co), h. 1.

⁷Terjemahan *abortion* menurut *Black's Law Dictionary*, diambil dari Suryono Ekotama, dkk., *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Fiktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Uniersitas Admajaya, 2001), h. 31.

⁸Ensiklopedi Indonesia, *Abortus* (Cet. I. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1980), h. 22.

pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu, yaitu *fetus* belum *viable by Ilaous*. Holmer mengemukakan definisi abortus sebagai terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16 dimana plasenta belum selesai.⁹

Secara umum pengertian *abortus provokatus kriminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu terlahir pada waktunya dan dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.¹⁰ Sedangkan secara yuridis *abortus provokatus kriminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.¹¹

Dari keragaman definisi itu penulis mempersepsikan istilah aborsi sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya terlahir. Artinya bahwa ada upaya kelahiran secara paksa yang berakibat hilangnya nyawa pada janin atau bayi tersebut.

2. Macam-Macam Abortus

Abortus secara medis dapat dibagi menjadi dua macam:

a. *Abortus spontaneus* adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Rustam Mochtar dalam Muhdiono menyebutkan macam-macam aborsi spontan:

1. *Abortus completes* (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.

⁹Rustam Muchtar, *Sinopsis Obstertri*, (Jakarta: ECG, 1998), h. 209, dalam Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan hanafi)*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah 2002), h. 20-21.

¹⁰Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: t.p, 1976), h. 99.

¹¹Masdawati, "Abortus Provokatus Kriminalis, Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif." (Makalah yang disampaikan pada Seminar Hukum Kesehatan di Universitas Tompotika, Luwuk Banggai, 14 Mei 2003), h. 53.

2. *Abortus inkopletus* (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan *plasenta*
3. *Abortus iminen*, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya *fetus* masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti *pasmodyca*
4. *Missed abortion*, keadaan dimana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
5. *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut tiga kali atau lebih.
6. *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, adalah abortus yang disertai infeksi genital.¹²

Kehilangan janin tidak disengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai dengan tiga bulan). Ini dapat terjadi karena penyakit antara lain: demam; panas tinggi; ginjal, spilis atau karena kesalahan genetik. Pada aborsi spontan tidak jarang janin keluar dalam keadaan utuh.¹³

b. *Abortus provokatus (indoset abortion)* adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat, ini terbagi menjadi dua:

1. *Abortus provocatus medicinalis* adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu.
2. *Abortus provocatus criminalis* adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh

¹²Rustam Muchtar dalam Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam*, op. cit., h. 33

¹³Yayasan Pengembangan Pedesaan, *Kesehatan Reproduksi*. (Cet. I. Malang: Danar Wijaya, 1997), h. 141.

aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan (seks pra nikah).

B. Metode Abortus dan Alasan-Alasan Aborsi.

1. Metode Aborsi

Ada beberapa metode abortus provokatus kriminalis yang dapat dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain, dengan cara sebagai berikut:

- a. Menggunakan kekerasan umum (*general violence*) yaitu dengan melakukan kegiatan fisik yang berlebihan, misalnya lari-lari.
- b. Menggunakan kekerasan lokal (*local violence*) yaitu dilakukan tanpa menggunakan alat, misalnya memijat perut bagian bawah; dengan menggunakan alat medis, misalnya tang kuret; menggunakan alat-alat non medis, misalnya kawat; menggunakan zat-zat kimia, misalnya larutan *zink chloride*.
- c. Menggunakan obat-obatan *abortifisien*, seperti obat *emetika* dan obat *omenagoga* atau obat pelancar haid.
- d. Menggunakan obat-obat *echolica* atau perangsang otot-otot rahim, seperti *kinina*.¹⁴

Ditinjau dari segi usia kehamilan, abortus provokatus medicalis dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Aborsi pada triwulan pertama sampai dengan 12 minggu. Pada kehamilan sampai batas 7 minggu pengeluaran isi rahim dilakukan dengan kuret tajam, agar ovum kecil tidak tertinggal, maka ovum uteri dikerok seluruhnya. Apabila kehamilan melebihi 6 sampai 7 minggu digunakan kuret tumpul sebesar yang dapat dimasukkan. Setelah hasil konsepsi sebagian besar lepas dari dinding *uterus*

¹⁴Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam*, op. cit., h. 51.

maka hasil tersebut dapat dikeluarkan dengan *cunam abortuis* dan kemudian dilakukan kerokan hati-hati dengan kuret tajam yang cukup besar, apabila diperlukan dimasukkan tampon ke dalam uteri dan vagina yang akan dikeluarkan esok harinya.

- b. Abortus pada kehamilan 12 sampai 16 minggu. Aborsi dilakukan dengan menggunakan perpaduan antara dilatasi, kuret dan pengisapan. Bahaya dari cara ini adalah terbentuknya luka-luka yang menimbulkan pendarahan.
- c. Abortus pada triwulan kedua (kehamilan sampai 16 minggu), dilakukan dengan menimbulkan kontraksi-kontraksi uterus supaya janin dan plasenta dapat dilahirkan secara spontan. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan *esantasi* (pembiusan lokal).¹⁵

2. Alasan-Alasan Abortus

Pengguguran kandungan yang terjadi dewasa ini lebih banyak didasarkan pada alasan sosiologis dibandingkan dengan alasan-alasan medis. Alasan-alasan sosiologis ini dilarang dan termasuk perbuatan pidana yaitu abortus provokatus kriminalis yang diancam hukuman pidana.

Apabila dijabarkan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun ilegal yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan-alasan tersebut sebagaimana tulisan Dewi Novita dalam bukunya “Aborsi Menurut Petugas Kesehatan” dan tulisan Yayah Chisbiyah, dkk, dalam bukunya “Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki,” sebagai berikut:

¹⁵Yayasan Pengembangan Pedesaan, *Kesehatan Reproduksi, op. cit.*, h. 142-143.

- a. Alasan kesehatan yaitu apabila ada indikasi vital yang terjadi pada masa kehamilan, apabila diteruskan akan mengancam dan membahayakan jiwa si ibu dan indikasi medis non vital yang terjadi pada masa kehamilan dan berdasarkan perkiraan dokter, apabila diteruskan akan memperburuk kesehatan fisik dan psikologis ibu. Selain itu juga didasarkan pada alasan kesehatan janin yaitu untuk menghindari kemungkinan melahirkan bayi cacat fisik maupun mental, walaupun alasan ini belum bisa diterima sebagai dasar pertimbangan medis.
- b. Alasan sosial; tidak seluruhnya kehamilan perempuan merupakan kehamilan yang dikehendaki, artinya ada kehamilan yang tidak dikehendaki dengan alasan anak sudah banyak, hamil di luar nikah sebagai akibat pergaulan bebas, hamil akibat perkosaan atau *incest*, perselingkuhan dan sebagainya. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki berusaha agar kehamilannya gugur baik melalui perantara medis (dokter) maupun abortif gelap (dukun) meskipun dengan resiko tinggi. Hasil penelitian tentang kehamilan yang tidak dikehendaki didasarkan pada alasan-alasan melakukan aborsi dari alasan yang terkuat sampai terlemah yaitu: ingin terus melanjutkan sekolah atau kuliah; takut pada kemarahan orang tua; belum siap secara mental dan ekonomi untuk menikah dan mempunyai anak; malu pada lingkungan sosial bila ketahuan hamil sebelum menikah; tidak mencintai pacar yang menghamili; hubungan seks terjadi karena iseng; tidak tahu status anak nantinya karena kehamilan terjadi akibat perkosaan apalagi apabila pemerkosa tidak dikenal.
- c. Alasan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi kaum perempuan juga dianggap faktor yang akan mempengaruhi peningkatan aborsi, perkembangan ekonomi menuju ekonomi industri melalui ekonomi manufaktur akan secara cepat meningkatkan jumlah perempuan muda diserap sebagai tenaga

kerja, juga mengikuti pendidikan lebih tinggi. Konsekuensinya penundaan perkawinan terjadi, padahal secara biologis mereka sudah beranjak pada masa seksual aktif. Hubungan seks di luar nikah akan meningkat, terutama karena dipicu oleh sarana hiburan, media film yang menawarkan kehidupan seks secara vulgar. Aborsi juga dianggap sebagai pilihan yang tepat karena adanya kontrak kerja untuk tidak hamil selama dua tahun pertama kerja dan apabila tidak aborsi resikonya adalah dipecat dari pekerjaan. Alasan ketidaksiapan ekonomi juga seringkali menjadi pertimbangan bagi perempuan berkeluarga yang tidak menghendaki kehamilannya untuk melakukan aborsi, seperti kegagalan Keluarga Berencana (KB), pendapatan rendah yang tidak mencukupi untuk menanggung biaya hidup.

- d. Alasan keadaan darurat (memaksa), kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan yang terjadi sebagai akibat pemaksaan (perkosaan) hubungan kelamin (persetubuhan) seorang laki-laki terhadap perempuan.¹⁶

C. Aborsi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan terhadap hal tersebut. Ketentuan-ketentuan dapat kita lihat dalam Q.S. Al-Maidah/5: 32, bahwa:



¹⁶Dewi Novita, *Aborsi menurut Petugas Kesehatan* (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997), h.16-20. Lihat juga dalam Yayah Chisbiyah, dkk, *Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki*, (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997), h. 47.

Aborsi yang merupakan suatu pembunuhan terhadap hak hidup seorang manusia, jelas merupakan suatu dosa besar. Merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yaitu pada Surat Al Maidah ayat 32 sebagaimana yang telah disebutkan di atas, setiap muslim meyakini bahwa siapapun membunuh manusia, hal itu merupakan membunuh semua umat manusia. Selanjutnya Allah juga memperingatkan bahwa janganlah kamu membunuh anakmu karena takut akan kemiskinan atau tidak mampu membesarkannya secara layak.

Dalam studi hukum Islam, terdapat perbedaan satu sama lain dari keempat mazhab hukum Islam yang ada dalam memandang persoalan aborsi, yaitu:

1. Mazhab Hanafi merupakan paham yang paling fleksibel, dimana sebelum masa empat bulan kehamilan, aborsi bisa dilakukan apabila mengancam kehidupan si perempuan (pengandung).
2. Mazhab Maliki melarang aborsi setelah terjadinya pembuahan.
3. Menurut Mazhab Syafi'i, apabila setelah terjadi fertilisasi *zygote* tidak boleh diganggu, dan intervensi terhadapnya adalah sebagai kejahatan.
4. Mazhab Hambali menetapkan bahwa dengan adanya pendarahan yang menyebabkan *miskram* menunjukkan bahwa aborsi adalah suatu dosa.¹⁹

Dengan melihat perbandingan keempat mazhab di atas, secara garis besar bahwa perbuatan aborsi tanpa alasan yang jelas, dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan dan merupakan suatu dosa besar karena dianggap telah membunuh manusia yang tidak bersalah dan terhadap pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, ketentuannya lebih fleksibel yang mana aborsi hanya dapat dilakukan apabila kehamilan tersebut benar-benar mengancam atau membahayakan nyawa si wanita hamil dan hal ini hanya dibenarkan untuk dilakukan terhadap kehamilan yang belum berumur empat bulan.

¹⁹[Http://www.lcl.cmu.edu/caae/Home/Forum/ethics.htm](http://www.lcl.cmu.edu/caae/Home/Forum/ethics.htm).

b. Pandangan Ulama Fikih Tentang Aborsi

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum Islam, praktik aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup. Oleh sebab itu, hukumannya sangat berat bagi mereka yang melakukannya.²⁰ Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Mekki Naciri, bahwa semua literatur hukum Islam dari mazhab-mazhab yang ada sepakat untuk mengatakan, bahwa aborsi adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang benar.²¹ Meski demikian pendapat para ulama berkaitan dengan kasus di atas yang berakhir dengan aborsi sangat beragam, khususnya dalam hal penentuan kapan dibolehkannya pengguguran kandungan dengan alasan yang dibenarkan tersebut.

Ulama dari Madzhab Hanafi membolehkan pengguguran kandungan sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan.²² Pandangan sebagian ulama lain dari madzhab ini hanya membolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki tahap *mudghah* atau janin memasuki usia 40 hari kedua.²³ Mayoritas ulama Hanabilah membolehkan pengguguran kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah (*'alaqah*) karena belum berbentuk manusia.²⁴ Syafi'iyah melarang aborsi dengan alasan kehidupan dimulai sejak konsepsi, diantaranya dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, tetapi

²⁰Yusuf Al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1980), h. 169.

²¹Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Isamic Perspective*. Terjemahan. *Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*, (Jakarta: Mizan, 1997), h. 156

²²Ibnu Abidin. *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Jilid II (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), h. 411.

²³*Ibid.*, h. 302.

²⁴Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid XII (Kairo: Hajar, t.th.), h. 210.

sebagian lain dari mereka yaitu Abi Sad dan Al-Qurthubi membolehkan. Namun Al-Ghazali dalam *Al-Wajiz* pendapatnya berbeda dengan tulisannya dalam *Al-Ihya*, beliau mengakui kebenaran pendapat bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah (*'alaqah*) atau segumpal daging (*mudghah*) tidak apa-apa karena belum terjadi penyawaan.²⁵ Kecuali mayoritas ulama Malikiyah melarang aborsi. Landasan hukum yang digunakan sebagai argumentasi bagi ulama-ulama tersebut adalah Hadits Nabi yang artinya:

“Dari Abi Abd Rahman Abdillah Bin Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa *nuthfah*, kemudian menjadi segumpal darah (*'alaqah*) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (*mudghah*) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia” (HR. Muslim).²⁶

Namun demikian pandangan ahli fikih yang membolehkan aborsi tersebut dalam realitas sosial tidak dapat dijadikan alternatif bagi perempuan yang tidak menghendaki kehamilannya. Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia berdasarkan Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: I/MUNAS VI/MUI/2000 tanggal 29 Juli 2000 ditetapkan:

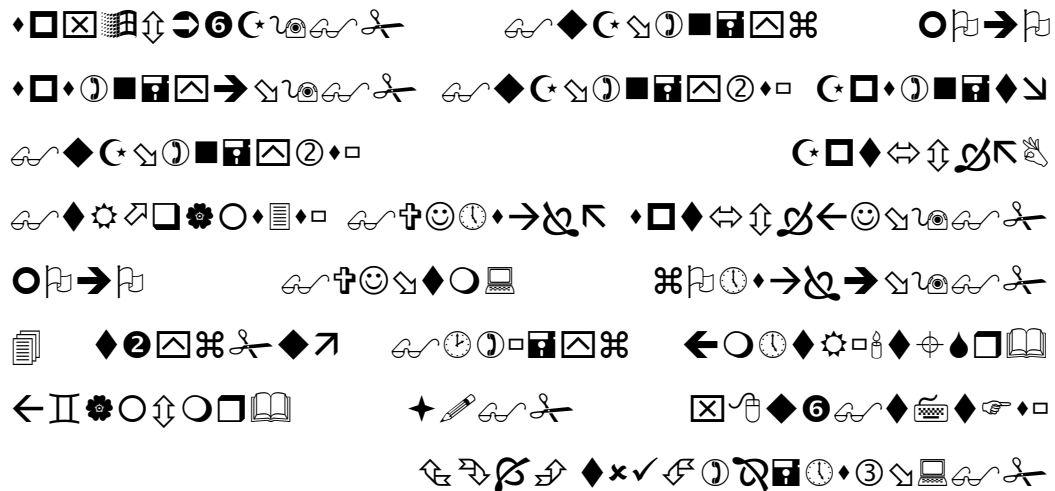
- (1) Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *naflkh al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu;
- (2) Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan *ovum*, walaupun sebelum *naflkh alruh*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari’at Islam;
- (3) Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu atau mengizinkan aborsi.

²⁵Al-Ghazali. *Al-Wajiz*. (Beirut: Daar Al-Ma’rifah, t.th.), h. 158.

²⁶Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim*. Jilid II (Beirut: Daar Al-Fikr, 1992), h. 549.

Terejemahannya:

“Kemudian Kami jadikan sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).”²⁸



Terjemahannya:

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”²⁹

Dalam ayat tersebut tidak menjelaskan secara tegas kapan sesungguhnya memasuki kehidupan sebagai manusia, apakah sejak tersimpan dalam rahim atau istilah kedokteran sejak zigot melekat dalam *endometrium* yang disebut dengan nidasi (*implantasi*) atau apakah sejak Tuhan menjadikannya sebagai makhluk yang berbentuk lain dari yang sebelumnya (*khalqan aakhar*). Kata *khalqan* berasal dari *khalaqa* artinya penciptaan. Di dalam Al-Qur'an ditemukan makna yang sama antara *khalaqa* dan *ja'ala*, seperti *khalaqa minha zaujaha* (Q.S. An-Nisa/4:1) dan *ja'ala minha zaujaha* (Q.S. Al-A'raf/7:189), keduanya memiliki arti yang sama. Tetapi dalam hal

²⁸*Ibid.*, h. 476.

²⁹*Ibid.*,

penciptaan ini, kata *khalaqa* menunjukkan Kemahakuasaan dan Kehebatan Allah yang tiada tara, sedangkan kata *ja'ala* hanya menunjukkan bahwa penciptaan itu dari materi yang sudah ada, yakni *nafs waahidah* (satu jenis dari bahan baku yang sama). Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa penciptaan dengan kata *khalq* bersifat gradual, seperti manusia berasal dari percampuran antara spermatozoa laki-laki dan ovum perempuan, kemudian menjadi zigot, embrio dan seterusnya.³⁰ Sedangkan kata *khalqan aakhir*, artinya *binafkhi alruh fihi*, dengan meniupkan ruh ke dalam penciptaannya.³¹

Mengenai batas awal kehidupan manusia kapan persisnya roh ditiupkan, di dalam hadis pun tidak dijelaskan, hanya disebutkan bahwa proses sperma (*nutfah*) berlangsung selama 40 hari pertama, 40 hari kedua berupa segumpal darah (*'alaqah*) dan 40 hari ketiga berupa segumpal daging (*mudghah*), setelah itu baru ditiupkan roh. Tetapi roh itu apa? Tidak ada penjelasan secara rinci, hanya disebut bahwa roh adalah urusan Tuhan. Tetap misterius hingga sekarang, karena hanya Tuhan yang mengetahui, sebagaimana disebutkan Al-Qur'an surat Al-Israa' 17:85 tadi. Teks tersebut adalah fakta yang menginformasikan bahwa roh adalah otoritas Tuhan, kapan ditiupkan ke dalam jiwa manusia menjadi kehidupan dan kapan dilepaskan dari dalam jiwa manusia menjadi sebuah kematian tidak ada seorang pun yang mengetahui.

Meskipun proses kehidupan dan kematian tersebut seluruhnya merupakan hukum alam (*sunnatullah*), tetapi tidak seluruhnya transparan dapat diketahui manusia karena ada rahasia alam yang menjadi domain Tuhan yang disebut metafisik (gaib), hanya bisa dirasakan tetapi tidak dapat diinderakan. Secara eksplisit dari hadits di atas tertangkap informasi bahwa roh ditiupkan ke dalam janin setelah 40 hari ketiga atau

³⁰Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata dan Tafsirnya*. (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997), h. 210.

³¹Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahally dan Jalaluddin Abd Rahman bin Abi Bakr Al-Suyuthy, *Tafsir Al-Jalalain*. (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), h. 1617,

setelah kehamilan berusia 120 hari. Sementara dalam Al-Qur'an, dengan kata *khalqan aakhar* yang memiliki arti ditiupkan roh ke dalam janin (*binafkhi al-ruuh fiih*) menunjukkan bahwa proses pembentukan manusia sudah berakhir saat roh ditiupkan ke dalam janin. Setelah itu, janin disebut menjadi makhluk yang lain yang secara substansial telah memiliki akal dan raga. Berbeda dengan sebelumnya yang secara substansi hanya memiliki raga tetapi belum berakal. Mengenai waktunya, saat kehamilan usia berapa hari peniupan roh tersebut terjadi, menjadi rahasia Tuhan sejak ayat tersebut turun hingga sekarang.

2. Perspektif Hukum Positif

Aborsi pada dasarnya adalah fenomena amoral yang mengakar dan menimbulkan efek metastarik dalam masyarakat Indonesia mulai dari tingkatan orang tua sampai level remaja. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena "terselubung" karena praktik aborsi sering tidak terkuak, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat serta perkembangan politik. Dari segi hukum positif, aborsi diatur dalam:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Agar dapat membahas secara detail dan cermat mengenai aborsi sebagai tindak pidana (*aborsus provokatus kriminalis*) kiranya perlu diketahui bagaimana konstruksi hukum yang berkaitan dengan tindakan aborsi sebagai kejahatan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Abortus provokatus kriminalis diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pasal 347 KUHP:
 - (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pasal 348 KUHP:
 - (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Pasal 349 KUHP: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.³²

P.A.F. Lamintang memberi penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

³²Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1990), h. 148-149.

1. Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan tetap hidup. (H.R. 1 November 1897. W.7038).
2. Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran kandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu bahwa anak itu menjadi mati karena usaha pengguguran tersebut. Kenyataan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, tidaklah menghapus bahwa kejahatan itu selesai dilakukan. Undang-undang tidak membedakan antara berkurang atau lebih lancarnya pertumbuhan anak yang hidup di dalam kandungan melainkan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang dapat dihukum. (H.R. 12 April 1898. W. 7113).
3. Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu hidup dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan anak yang berada di dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa kesengajaan itu ada, apabila selama proses kelahiran anak itu berada dalam keadaan hidup dan si pelaku diliputi oleh anggapan bahwa demikianlah halnya. (H.R. 29 Juli 1907. W. 8580).
4. Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim di dalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja

menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut. (H.R. 20 Desember 1943, 1994 No. 232).³³

Pasal-pasal tentang abortus provokatus tersebut di atas, mengancam siapapun yang dengan senjata menyebabkan aborsi (pengguguran kandungan) baik bagi si pelaku maupun bagi penolong aborsi seperti dokter, bidan, ahli obat, dukun dan ahli medis lainnya dengan hukuman dilipatgandakan, tanpa pengecualian dan dengan alasan apapun.

Pada saat ini, aturan tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan karena bertentangan dengan politik hukum Indonesia yang melindungi dan mensejahterakan segenap bangsa Indonesia.

Sebagaimana diketahui, latar belakang pemikiran dari pasal-pasal tentang pengguguran kandungan berasal dari Negara Belanda pada pertengahan abad ke- 19 yang berasal dari *Code Penal* Perancis abad ke-18, sudah barang tentu hal ini kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, terutama yang menyangkut kepentingan-kepentingan darurat (pengguguran kandungan yang bersifat memaksa karena adanya perkosaan), tapi pasal-pasal ini sampai saat ini tetap diterapkan.

Pasal 349 KUHP merupakan salah satu pasal yang dilematis apabila diterapkan secara mutlak. Para dokter, bidan dan perawat serta tenaga medis lainnya dapat diancam pidana penjara. Padahal alasan melakukan abortus adalah demi melindungi jiwa si ibu. Perkembangan hukumnya kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur tentang abortus provokatus medikalis dengan spesifikasi *therapeuticus*. Akan tetapi undang-undang tersebut kemudian di cabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan,

³³P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 206.

karena dinilai Undang-undang yang lama (Undang-Undang No. 23 Tahun 1992) sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian undang-undang ini menimbulkan kontroversi karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi.

Undang-Undang ini mengklasifikasikan aborsi dalam kasus dan situasi tertentu, aborsi bukan sebagai tindak pidana (*abortus provocatus medicalis*) dan bila mana aborsi yang dilakukan melanggar ketentuan pada yang di sebutkan dalam undang-undang tersebut maka aborsi adalah tindak pidana (*abortus provocatus kriminalis*).

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur aborsi dalam:

1. Pasal 75:

- a. Ayat 1, “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”.
- b. Ayat 2, “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- c. Ayat 3, “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakuna setelah melalui konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan

konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- d. Ayat 4, “Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah”.
2. Pasal 76, “Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:
 - a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
 - b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
 - e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.”³⁴
 3. Pasal 194 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁵

Pasal 75 dan 76 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, kembali menegaskan bahwa pada dasarnya undang-undang melarang adanya praktik aborsi (Pasal 75 ayat 1). Meski demikian larangan tersebut dikecualikan apabila ada:

³⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33-34.

³⁵*Ibid.*, h. 84.

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan (Pasal 75 ayat 2).

Terlepas dari hukum formal yang mengatur, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia aborsi lebih condong sebagai aib sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan politik. Aturan normatif legal formal menolak aborsi meski masih ada ruang untuk hal-hal khusus. Aturan normatif sosial-budaya-agama yang "informal" pada umumnya juga menolak aborsi, meski terdapat variasi dan kelonggaran di sana-sini. Persoalan aborsi penting untuk dibahas karena fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan kesehatan reproduksi perempuan.

Untuk kasus Indonesia, seperti diketahui, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah karena praktek aborsi terutama bagi ibu pada usia yang masih sebagai akibat salah pergaulan ataupun belum siap memiliki anak, selain persoalan pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan faktor struktural lain yang lebih luas.

D. Unsur-unsur Perbuatan Pidana Aborsi dan Sanksi Hukum Pelaku Abortus Provokatus

1. Unsur-unsur Pidana Abortus

Unsur-unsur perbuatan *abortus provokatus kriminalis* adalah:

- a. Unsur *pertama*: Adanya *embrio* (janin) atau ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung janin merupakan obyek yang harus ada dalam perbuatan pidana,

karena tidak akan ada perbuatan pidana tanpa ada obyeknya. Hal ini penting dalam rangka penjatuhan pidana.³⁶

- b. Unsur *kedua*: Adanya unsur kesengajaan dari pelaku. Sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* dalam bukunya Moeljatno berarti melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui artinya si pelaku perbuatan pidana mengetahui dengan betul bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum).
- c. Unsur *ketiga*: Keguguran itu terjadi sebelum waktunya artinya sebelum masa kelahiran alami tiba.³⁷ Hal ini berarti perbuatan pengguguran harus dapat dibuktikan bahwa keguguran itu terjadi ketika anak yang ada dalam kandungan itu hidup dan belum masanya untuk dilahirkan. Untuk kepentingan unsur yang ketiga ini bisa dilakukan oleh dokter melalui ilmu kedokteran agar bisa memberi keterangan mengenai janin yang ada dalam kandungan seorang wanita tersebut berada dalam keadaan hidup atau mati. Karena dalam hukum, anak yang belum lahir ke dunia bila dapat dibuktikan dalam kandungan bahwa bayi tersebut mati belum mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum.³⁸
- d. Unsur *keempat*: Adanya jalan untuk melakukan perbuatan tersebut. Jalan yang dimaksud adalah adanya alat-alat yang digunakan untuk melakukan aborsi. Misalnya dengan bantuan dokter, dukun atau bidan yang memberi bantuan supaya aborsi dapat terjadi dengan suntik atau diberi obat yang dapat membunuh

³⁶Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, tp, 1982), h. 40-43.

³⁷Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. II. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 115.

³⁸P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, *op.cit.*, h. 206.

janin yang ada dalam tubuh si ibu, bisa juga dengan memasukkan alat-alat tertentu ke anggota tubuh.³⁹

2. Sanksi Hukum Pelaku Abortus Provokatus

Suatu aturan hukum diadakan pasti diikuti dengan sanksi hukumnya, sehingga peraturan hukum tidak hanya mengatur akan tetapi juga bersifat memaksa bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.

Hukum pidana diadakan pada prinsipnya adalah dalam rangka memberikan ketertiban dan kepastian hukum agar hak-hak manusia terlindungi. Oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana bermacam-macam mulai yang terberat yaitu hukuman mati sampai yang paling ringan yaitu hukuman denda. Kecuali ada alasan pembenar yang dapat dijadikan legitimasi/legalisasi dari perbuatan pidana yang dilakukan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 (karena jiwanya cacat), Pasal 48 (adanya pengaruh daya paksa), Pasal 50 (melaksanakan ketentuan UU) dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan).

Menanggapi alasan pembenar yang terdapat dalam Pasal 44, 48, 50 dan 51 KUHP, Oemar Seno Adji mengatakan bahwa ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan yang bukan didasarkan pada alasan-alasan pembenar yang terdapat dalam undang-undang yaitu yang berada di luar undang-undang yang dikembangkan oleh ilmu hukum dan yurisprudensi.⁴⁰

³⁹Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, *op. cit.*, h. 116.

⁴⁰Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 194.

Sanksi hukum bagi pelaku abortus provokatus baru dapat diberikan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu unsur-unsur perbuatan abortus provokatus kriminalis, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP dan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Sanksi hukuman berupa hukuman pidana penjara maksimal, yaitu:

- a. 4 (empat tahun) bagi wanita yang dengan sengaja mematikan janinnya (Pasal 346 KUHP),
- b. 12 (dua belas tahun) bagi seseorang yang menggugurkan kandungan wanita tanpa persetujuan (Pasal 347 ayat 1 KUHP),
- c. Maksimal 15 (lima belas tahun) bagi pengguguran kandungan tanpa persetujuan wanita yang berakibat matinya wanita tersebut, dan juga yang dengan persetujuan (Pasal 347 ayat 2 KUHP),
- d. 5 (lima tahun), 6 (enam bulan) bagi pengguguran yang disengaja dengan kesepakatan wanita (Pasal 348 ayat 1 KUHP).
- e. 7 (tujuh tahun) pengguguran disengaja dengan kesepakatan yang berakibat mati (Pasal 348 ayat 2 KUHP).
- f. Ditambah 1/3 (sepertiga lebih tinggi bagi ahli medis dibanding selain ahli medis. Bahkan ditambah dengan pencabutan izin praktek yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 349 KUHP).
- g. 10 tahun bilamana melakukan aborsi yang melanggar ketentuan pasal 75 undang-undang kesehatan (pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Sanksi hukum juga dapat berupa denda, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 194 yang menerapkan denda maksimal 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Akan tetapi pasal ini tidak menjadi

pertimbangan atau dasar putusan hakim dalam memutuskan kasus pidana aborsi di pengadilan.

Terhadap orang lain yang ikut melakukan perbuatan abortus baik melakukan atau membantu melakukan, dapat digolongkan pada turut serta terhadap perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, turut serta digolongkan menjadi lima macam sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu:⁴¹

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*),
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*),
- c. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*),
- d. Orang yang membujuk untuk melakukan (*Uitlokker*),
- e. Orang yang membantu melakukan (*Medeplichtige*).

Hukum pidana dengan jelas menyebut sanksi hukum bagi pelaku dan orang yang turut serta melakukan aborsi. Pengecualian diberikan apabila ada alasan-alasan pembenar yang terdapat dalam undang-undang (Pasal 44, 48, 50 dan 51) KUHP dan alasan medis (kesehatan) yang terdapat dalam Pasal 75 dan 76 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian alasan ekonomi, alasan sosial dan alasan darurat (pemaksa) tidak dapat dijadikan sebagai legalisasi dari perbuatan abortus.

Apabila dihubungkan dengan kondisi sekarang, khususnya alasan yang terakhir yaitu aborsi karena alasan darurat (pemaksa) sebenarnya perlu menjadi pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana, khususnya bagi para penegak hukum (hakim). Karena janin yang diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan (perkosaan) dengan ancaman kekerasan. Perkosaan sendiri merupakan perbuatan pidana yang pelakunya harus dijatuhi hukum pidana maksimal 12 (dua belas) tahun sesuai Pasal 285 KUHP.

⁴¹Utrecht, *Hukum Pidana* (Cet. II. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), h. 8. Bandingan dengan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), h. 72-74.

Sedangkan korbannya harus mendapat perlindungan hukum yang salah satu caranya adalah mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis). Alasan tekanan psikologis akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan.

Arif Gosita dalam bukunya *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan* mengatakan bahwa:

“Dalam kasus abortus, janin ditolak sebagai makhluk hidup dan dianggap sebagai obyek mati. Oleh karena diformulasikan seperti itu maka penghancurannya saat itu tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan dan tidak menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan moral seperti pada kasus pembunuhan lain.”⁴²

Sudah menjadi opini publik bahwa salah satu latar belakang abortus dilarang undang-undang adalah karena bertentangan dengan kaidah moral masyarakat dan atau moral agama. Apabila dihubungkan dengan pendapat tersebut, sebenarnya yang menentang moral adalah pemerkosannya bukan orang yang melakukan aborsi. Aborsi hanyalah merupakan akibat tindakan orang biadab yang memperkosa perempuan, sehingga perempuan tersebut menjadi hamil. Perempuan dalam hal ini adalah sebagai korban dari rentetan perbuatan pidana (perkosaan), sehingga apabila perbuatan pidana yang dilakukan terhadapnya berakibat hamil maka janin yang dikandungnya adalah dianggap sebagai obyek yang mati atau tidak hidup. Oleh karena dianggap sebagai obyek yang mati maka penggugurannya, dianggap legal untuk dilakukan.

Apabila dihubungkan dengan pasal 49 KUHP, sebenarnya pasal ini mengakui adanya daya paksa bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, Moeljatno membagi daya paksa menjadi 2 yaitu daya paksa dalam arti sempit

⁴²Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), h. 88.

atau *overmacht* dan daya paksa karena keadaan darurat atau *noodtoestand* yang terdiri dari 3 kemungkinan yaitu:

- a. Orang terjepit antara dua kepentingan dalam hal adanya konflik diantara dua kepentingan,
- b. Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban,
- c. Orang terjepit antara dua kewajiban.⁴³

Dihubungkan dengan teori tersebut, kasus abortus provokatus terjadi konflik antara 2 (dua) hak, hak perempuan yang hamil bertentangan dengan hak janin. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provokatus atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari kepentingan manakah yang lebih utama.⁴⁴ Hak janin untuk tetap hidup atau hak perempuan untuk tetap menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial.

Mencermati undang-undang yang telah diberlakukan dikaitkan dengan keadaan sekarang, khususnya berkait dengan aborsi karena alasan darurat (pemaksa) pada akhirnya penyelesaian kasus tersebut sangat tergantung pada para penegak hukum untuk menegakkan keadilan terutama bagi perempuan yang jelas-jelas berkedudukan sebagai korban. Pendapat ahli hukum masa kini, sudah seharusnya menjadi pertimbangan dalam rangka menjatuhkan pidana, jadi tidak semata-mata didasarkan pada bunyi undang-undang, walaupun mislanya Undang-Undang Kesehatan khususnya pada pasal 75 ayat 2 di katakan bahawa korban perkosaan boleh melakukan aborsi akan tetapi juga memperhatikan latar belakang perbuatan dilakukan. Hal ini pun dalam proses pembuktiannya juga tidak mudah, karena harus dibuktikan lebih dahulu perkosaannya.

⁴³ Moljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, *op. cit.*, h. 140.

⁴⁴ Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif fiktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, *op. cit.*, h. 194.

Dengan demikian alasan psikologis tidak cukup dijadikan alasan aborsi apabila tindakan perkosaannya tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti. Mengingat dewasa ini perkosaan tidak hanya murni dilakukan oleh orang yang benar-benar belum pernah dikenal oleh korban, tapi juga telah dikenal sebelumnya bahkan memiliki hubungan dekat dengan korban (misalnya sebagai pacar).

Apabila aborsi karena perkosaan dijadikan pengecualian sebagaimana alasan medis, maka kriteria yang dijadikan pengecualian harus benar-benar jelas dan tegas, sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, akibatnya aborsi semakin marak dilakukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai dan lain-lain. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait aborsi serta instansi yang berkaitan dengan kasus tersebut, yakni Pengadilan Negeri Makassar dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar (Rumah Sakit Daya).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang akan diamati sebagai wakil dari populasi sampel harus benar-benar representatif. Untuk mendapatkan data yang akan diperlukan dalam penelitian ini, maka sampel yang akan diambil dari 1 orang bidan atau dokter yang menangani pasien abortus dari RSUD Kota Makassar, dan 2 orang pelaku aborsi dalam hal ini penulis mengambil sampel dari pasien abortus yang dirawat di RSUD Kota Makassar.

B. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Pendekatan yuridis; yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Pendekatan sosiologis; yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat pengaruh timbal balik antara kehidupan sosial dengan penegakan hukum, begitupun sebaliknya.

- c. Pendekatan syar'i; yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bahasan masalah dari segi hukum Islam dan dapat membandingkan dengan hukum positif.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat dalam melaksanakan penelitian. Instrument penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya-jawab terkait masalah pokok yang akan diteliti.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis seperti gambaran umum wilayah penelitian, jumlah kasus aborsi, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

1. Teknik pengumpulan data

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka; langkah awal dari setiap penelitian hukum karena hukum selalu bertolak kepada premis normatif dan hukum merupakan ilmu terapan.¹
- b. Pengamatan terhadap masyarakat untuk menghasilkan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat yaitu dalam penelitian. Peneliti menafsirkan fakta-fakta yang didapat dalam penelitian, dan akan menjadi konsep terhadap gejala yang di amat. Dalam pengaman, penelitian ini menggunakan pengamatan tidak terlibat.

¹ Aminuddin, Pengantar Penelitian Hukum, (Cet II; Jakarta, Raja Grafindo, 2004), h. 8

- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber mengenai hal-hal yang akan diteliti. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.
- d. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis seperti gambaran umum wilayah penelitian, jumlah kasus aborsi, dan lain-lain.

2. Teknik analisa data

Untuk menyimpulkan data yang diperoleh, maka perlu analisis agar dapat mencapai suatu kesimpulan. Karena ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat implementatif. Dari analisa data yang didapat dari fakta, dikorelasikan dengan acuan undang-undang yang mengatur aborsi.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hal-hal yang dideskripsikan tersebut antara lain:

- a. Eksistensi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 terhadap tindak pidana aborsi serta penerapan hukumnya di kota Makassar.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi di Kota Makassar. Data kuantitatif juga diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai pendukung terhadap data kualitatif tetapi tidak untuk dianalisis secara statistik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Fenomena Aborsi di Makassar

Selayang pandang geografis Kota Makassar, kian menggelamor. Dengan jumlah penduduknya yang berkisar sekitar 1,6 juta jiwa, jumlah yang terbilang padat. Terlihat dengan berbagai bangunan arsitektural yang gagah berdiri kokoh, menjulang tinggi. Berbagai fasilitas umum serba canggih dan lengkap, hal ini semakin menampakkan bahwa Makassar memang telah modern dan layak menyandang gelar sebagai kota metropolitan.

Akan tetapi, kemodernan tersebut di atas secara bersamaan kian menggilas norma-norma dan kaidah sosial dalam kehidupan masyarakat Makassar. Terlebih bagi generasi muda. Kehidupan generasi muda cenderung berorientasi pada kehidupan hedonis dan eskapistis. Budaya *clubing* atau dugem (dunia gemerlap) menjadi hobi dan kegemaran mereka dan lebih senang mangkal di Tempat Hiburan Malam (THM). Distorsi budaya ini mempengaruhi interaksi sosial yang bermuara pada pergaulan bebas (seks bebas).

Sekarang ini hampir tidak ada remaja yang tidak memiliki pasangan kencan (pacar). Hal ini juga berlatar akan pandangan dan persepsi remaja yang merasa tidak modern atau gagal dalam menyesuaikan diri dengan zaman tanpa adanya pacaran. Seseorang dianggap kolot atau kuno bila tanpa pacar dan dicap tidak gaul atau tidak laku dan didiskualifikasi dalam pergaulan. Pandangan keliru ini yang kemudian menggiring kehidupan kaum muda pada pergaulan bebas atau “kumpul kebo” (*free sex*) yang tidak jarang terjadi hamil di luar ikatan pernikahan. Dalam kondisi seperti itu situasi mulai

terasa genting. Karena satu sisi malu ketahuan oleh orang lain, di sisi lain mereka belum siap menjalani dan membina rumah tangga sendiri. Maka aborsi menjadi pilihannya.

Kasus seperti di atas seperti yang penulis ambil sebagai sampel yaitu Trully, umur 25 tahun salah satu pasien abortus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar (Rumah Sakit Daya), yang menggugurkan kandungannya akibat hamil di luar nikah. Ia terpaksa menggugurkan kandungannya yang berusia 2 bulan karena ditinggal pergi oleh kekasihnya (pacarnya). Alasan yang ia sebutkan kepada penulis atas pengguguran kandungannya karena sang pacar tidak mau bertanggung jawab atas janin yang ia kandung, padahal mereka telah lama berpacaran. Akhirnya ia memilih jalan menggugurkan janinnya karena ia tidak ingin menanggung malu melahirkan anak tanpa suami yang sah.¹ Sebelum masuk ke RSUD Kota Makassar, Trully sempat menjalani proses pengguguran kandungannya dengan menggunakan jasa dukun kampung. Akan tetapi karena mengalami pendarahan Trully kemudian dilarikan ke RSUD Kota Makassar untuk mendapatkan pertolongan medis karena kondisinya sudah darurat.

Berbeda halnya dengan kasus aborsi yang dialami Trully. Seorang ibu yang bernama Ainah, umur 40 tahun yang juga merupakan pasien RSUD Kota Makassar, terpaksa melakukan abortus karena sudah memiliki 7 orang anak. ia memilih aborsi atas kandungannya yang baru berusia 3 bulan demi mengurangi beban ekonomi dalam keluarganya. Berdasarkan pengakuan ibu Ainah, sebagai seorang ibu, ia tidak tega menggugurkan kandungannya tersebut akan tetapi ia juga tidak sanggup membiayai hidup anaknya kelak. Apalagi dengan jumlah anaknya yang sudah banyak.²

¹ Wawancara penulis dengan Trully, pasien abortus di RSUD Kota Makassar (R.S. Daya), pada tanggal 4 Agustus 2010.

² Wawancara penulis dengan Ainah pasien abortus di RSUD Kota Makassar (R.S. Daya), pada tanggal 4 Agustus 2010.

Kedua kasus abortus di atas dibenarkan oleh bidan Sukma yang menangani pasien tersebut lewat wawancara dengan penulis.

“kami memang sering mendapatkan pasien abortus yang sebelumnya ditangani oleh dukun kampung, nanti setelah mengalami pendarahan atau gejala-gejala lain baru dibawa ke rumah sakit. Seperti yang dialami pasien Trully dan ibu Ainah. Kami mendapatkan pasien dalam kondisi pendarahan baik itu pasiennya telah bersuami maupun yang belum bersuami, tapi kadang pasien yang belum bersuami memberi alasan yang kurang jelas, alasan biasanya suaminya pergi merantau dan belum kembali. Kami sebagai dokter atau bidan ketika mendapati pasien yang dalam kondisi yang gawat, kami harus menolong pasien karena jika tidak, bisa saja berakibat lebih fatal dan kebanyakan pasien yang kami temukan adalah pasien yang berusia muda mungkin saja hamil di luar nikah, akan tetapi karena kondisinya sudah gawat terpaksa kami ambil tindakan demi keselamatan pasien, kebanyakan pasien abortus seperti itu sebelumnya telah ditangani oleh dukun kampung atau telah mengkonsumsi obat. Sementara pasien abortus dengan alasan karena korban pemerkosaan di RSUD Kota Makassar ini masih sangat minim kami temukan”.³

Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Kota Makassar jumlah kasus aborsi pada tahun 2008 yaitu 76, tahun 2009 sebanyak 82 dan tahun 2010 sebanyak 58 (terhitung sejak bulan Januari sampai bulan Juni 2010).⁴ Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus aborsi meningkat dalam tiap tahun, dan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat Makassar juga masih banyak terdapat praktik aborsi yang dilakukan secara diam-diam dan belum terungkap.

Fenomena aborsi di Makassar terbilang marak dan kebanyakan pelakunya adalah mereka yang hamil di luar nikah. Kasus aborsi merupakan suatu fakta yang terselubung. Para pelaku merahasiakannya karena takut tertangkap oleh pihak kepolisian, juga karena malu dan takut ketahuan oleh orang lain dan keluarganya. Dalam kenyataannya juga banyak ditemukan perempuan yang hamil di luar nikah, meminum obat khusus atau obat lain (misalnya: obat pelancar haid atau minuman beralkohol) yang dapat menggugurkan

³ Wawancara penulis dengan Bidan Sukma, di RSUD Makassar pada tanggal 4 Agustus 2010

⁴ Data RSUD Makassar 2008, 2009 hingga Juni 2010

kandungan, bahkan tidak jarang ada juga yang sengaja melompat-lompat untuk menggugurkan kandungannya. Singkatnya banyak cara yang mereka lakukan asalkan kandungannya dapat digugurkan..

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi seiring banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat. Baik oleh dukun kampung maupun dokter, bahkan obat-obat yang dapat menggugurkan kandungan banyak dijual di apotik-apotik. Walaupun fenomena aborsi sudah demikian maraknya, namun sampai sejauh ini masih sedikit pelaku yang tertangkap oleh aparat kepolisian. Hal ini dikarenakan para pelaku sulit untuk diketahui keberadaanya.

B. Eksistensi KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Makassar

Eksistensi atau keberadaan KUHP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap tindak pidana aborsi perlu pengkajian yang mendalam. Dalam KUHP pada pasal 346, 347, 348 dan 349 cukup jelas mengenai aturan tentang aborsi sebagai suatu tindak pidana. Sementara dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 75 dan Pasal 76 memberi pengecualian terhadap aborsi sebagai tindakan legal atau dapat dibenarkan bilamana aborsi yang dilakukan tersebut disertai dengan alasan medis.

Kedudukan KUHP dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 sama-sama memiliki kekuatan hukum terhadap tindak pidana aborsi, namun dalam muatan hukum yang berbeda. Artinya bahwa KUHP sangat melarang aborsi, dan memandang aborsi secara umum, sementara dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada keadaan tertentu aborsi perbuatan legal yang dilindungi secara hukum dan terbebas dari unsur pidana.

Dari sudut pandang antara kedua aturan di atas maka secara umum, aborsi (*abortus provokatus*) diklasifikasikan menjadi dua yaitu aborsi yang dibenarkan secara hukum atau *abortus provokatus medicinalis* dan aborsi yang termasuk sebagai tindak pidana atau *abortus provokatus criminalis*.

1. *abortus provokatus medicinalis*

Yaitu bilamana pengakhiran kehamilan harus dilakukan karena alasan medis bahwa kehamilan yang terjadi membahayakan ibunya atau alasan kondisi janin cacat (*aborsi provokatus terapeutikus*).

Seorang perempuan tidak mampu mempertahankan kehamilannya baik karena adanya vonis dari dokter terhadap kesehatan dan keselamatan nyawanya atau bayinya ataupun karena hamil akibat perkosaan. Jenis aborsi ini secara hukum dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 75 ayat (2, 3) dan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Ada beberapa hal yang dapat dicermati dari jenis aborsi ini yaitu bahwa ternyata aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan adanya pertimbangan medis. Dalam hal ini berarti dokter atau tenaga kesehatan mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya.

2. *Abortus provokatus kriminalis*

Yaitu tindakan pengguguran kehamilan di luar daripada atau selain *abortus provokatus medicinalis*. Aborsi semacam ini digeneralisasikan sebagai aborsi ilegal atau tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi seperti ini dikatakan sebagai tindakan pidana atau kejahatan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349.

Berdasarkan keempat pasal tersebut maka berarti bahwa apapun alasannya di luar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi.

Kalau dicermati ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dilandasi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subyek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Juga apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya. Sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Fakta aborsi di Makassar merupakan suatu fenomena yang marak terjadi, mulai dari yang dilakukan oleh para gadis usia remaja yang terjebak karena hamil di luar nikah sampai pada ibu rumah tangga yang melakukan aborsi karena alasan tidak mampu atau sudah banyak anak. Akan tetapi seiring banyaknya praktik aborsi, hanya sedikit yang tersentuh oleh penerapan hukum.

Dalam kenyataannya di masyarakat, aborsi sebagai problematika sosial yang mengkalut dalam masyarakat dan perlu adanya ketegasan dan kejelasan hukum agar praktik aborsi secara ilegal dapat diberantas. Selain itu, juga perlu adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati aturan-aturan itu sendiri, bahwa aborsi adalah perbuatan melanggar hukum serta bertentangan dengan kaidah moral, norma adat dan norma agama.

Adapun data aborsi yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Makassar selama lima tahun terakhir sejak tahun 2005 sampai 2009 yang pernah disidangkan adalah sebagai berikut:⁵

⁵Data Pengadilan Negeri Makassar, 2005-2009.

1. Tabel Perkara Aborsi tahun 2005

No	NO PERKARA NAMA TERDAKWA	PASAL	TUNTUTAN	PUTUSAN	KET
1	1399/Pid.B/2005/PN.Mks	341, 346	6 Bulan	6 Bulan	
	Iswari Binti Raja				
2	1400/Pid.B/2005/PN.Mks	348	6 Bulan	6 Bulan	
	Sangging Binti Manye				

2. Tabel perkara aborsi tahun 2006

No	NO PERKARA NAMA TERDAKWA	PASAL	TUNTUTAN	PUTUSAN	KET
1	25/Pid.B/2006/PN.Mks	341, 346	6 Bulan	6 Bulan	
	Irawati				
2	26/Pid.B/2006/PN.Mks	348	6 Bulan	6 Bulan	
	Jira				

3. Tabel perkara aborsi tahun 2007

No	NO PERKARA NAMA TERDAKWA	PASAL	TUNTUTAN	PUTUSAN	KET
1	263/Pid.B/2007/PN.Mks	347 (2)	5 Tahun	Bebas	
	Saliarung	Ayat (1)			
2	265/Pid.B/2007/PN.Mks	347, 348	5 Tahun	3 Tahun	
	Adi HS	Ayat (2)			
3	431/Pid.B/2007/PN.Mks	348	4 Bulan	2 Bulan	
	Harun				

4. Tabel perkara aborsi tahun 2008

No	NO PERKARA NAMA TERDAKWA	PASAL	TUNTUTAN	PUTUSAN	KET
1	487/Pid.B/2008/PN.Mks	348	10 Bulan	6 Bulan	
	Samhara Alias Sarah	Ayat (1)			
2	488/Pid.B/2008/PN.Mks	348 Ayat (1), (2)	10 Bulan	6 Bulan	
	Sandi Sulaeman				
3	918/Pid.B/2008/PN.Mks	348 Ayat	5 Bulan	Bebas	
	Sitti Binti Madong	(1)			

5. Tabel perkara aborsi tahun 2009

No	NO PERKARA NAMA TERDAKWA	PASAL	TUNTUTAN	PUTUSAN	KET
1	131/Pid.B/2009/PN.Mks	342 dan 346	4 Bulan	2 Bulan	
	Sisilia Juniarti alias Anti				

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kasus aborsi yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2005 sampai 2009 sangat minim, apalagi pada tahun 2010 sampai saat ini belum ada yang masuk ke pengadilan, sementara realitas praktek aborsi yang terjadi dalam masyarakat Makassar sangat banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi aturan tentang aborsi tidak efisien.

Dari data tersebut di atas juga menunjukkan bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa cenderung ringan, selain itu putusan hakim atas kasus tindak pidana aborsi juga sangat ringan, malah lebih ringan daripada tuntutan jaksa. kebanyakan sanksinya hanya diputuskan 6 bulan penjara saja, bahkan ada juga yang diputuskan bebas. Hal ini juga menggambarkan bahwa lemahnya eksistensi hukum, dalam hal ini KUHP dan Undang-

Undang Kesehatan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus tindak pidana aborsi di Makassar. Sejatinya perlu ada sinergitas antara peran jaksa dan hakim dalam menegakkan sebuah aturan dalam lingkup lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Negeri Makassar.

Eksistensi KUHP dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai hukum yang menjadi dasar putusan hakim belum terealisasi secara konsisten terhadap tindak pidana aborsi di Makassar, sehingga pada kenyataannya fenomena aborsi di Makassar masih menjadi problem di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena:

- a. Kurang tegasnya lembaga penegak hukum dalam mengentaskan masalah aborsi di Makassar;
- b. Antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang aborsi masih terjadi tumpang tindih sehingga lemah dalam penerapannya;
- c. Masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan tentang aborsi, sehingga sosialisasi dari Undang-Undang Kesehatan belum menyentuh secara menyeluruh kepada masyarakat.

Seyogyanya butuh waktu untuk menerapkan sebuah aturan secara maksimal apalagi mengenai Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang baru disahkan setahun yang lalu. Sangat mungkin sosialisasi undang-undang tersebut belum sampai pada masyarakat secara menyeluruh, bahkan kalangan medis sekalipun. Karena fakta yang penulis temukan terkadang sebagian tenaga medis masih mengacu pada Undang-Undang Kesehatan yang lama (yang tidak berlaku lagi). Selain itu dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 juga masih banyak kerancuan, sehingga kurang

menjamin kepastian hukum dan keadilan jika dijadikan sebagai dasar putusan dalam pengadilan khususnya terhadap kasus aborsi.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aborsi di Makassar

Abortus provocatus berkembang sangat pesat dalam masyarakat Makassar, hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku untuk melakukan aborsi. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi.

Di antara beberapa faktor yang ada, penulis mendeskripsikan faktor-faktor umum yang mempengaruhi terjadinya aborsi di Makassar, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor dari hukum itu sendiri.

Lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai *abortus provocatus* telah ditetapkan secara cukup jelas, tetapi aturan yang tertulis tersebut tidak mengatur secara detail mengenai sanksi yang diterima bagi pelaku *abortus provocatus* tersebut. Seperti yang dijelaskan pada pasal 299 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan:

"Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah".⁶

Juga pada pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan :

"Seseorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".⁷

⁶Prof. Moeljatno, S.H., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Cet. XXVI. Jakarta: 2007), h. 109

⁷ *Ibid.*, h.124.

Dari pasal-pasal yang disebut di atas sudah jelas bahwa hukum yang mengatur masalah *abortus provocatus* masih sangat lemah. Maksudnya bahwa pada pasal-pasal tersebut hukuman yang dikenakan pada pelaku aborsi terkesan amat sangat ringan yaitu hanya empat tahun penjara dan atau denda sekurang-kurangnya tiga ribu rupiah, bahkan berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar kebanyakan pelaku aborsi yang pernah disidangkan hanya diputus pidana penjara hanya dua sampai enam bulan. Padahal ditinjau dari segi manapun perbuatan atau tindakan aborsi adalah tindakan menghilangkan nyawa yang juga berarti adalah tindakan pembunuhan yang mestinya dihukum seberat mungkin, ironisnya malah seolah-olah ada kesan bahwa perbuatan atau tindakan aborsi adalah tindakan yang dibolehkan.

Kasus *abortus provocatus* ini juga diatur dalam pasal 348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun enam bulan".⁸

Demikian juga pada pasal 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

"Bahwa jika seorang dokter, bidan, juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu bisa ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu".⁹

Dalam pasal ini menerangkan bahwa jika si pelaku adalah seorang dokter, bidan, ataupun juru obat, maka hukuman yang diperoleh hanya ditambah sepertiganya dan sanksi dipecat dari jabatannya. Inipun juga terkesan amat ringan, bagaimana bisa kalau si pelaku nyata-nyata adalah seorang dari petugas kesehatan melakukan tindakan ilegal

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

hanya dihukum lima tahun lebih sedikit, padahal seorang petugas kesehatan harusnya lebih tahu tindakan yang tidak didasari oleh tindakan medis adalah tindakan yang melanggar hukum. Hal yang ironi penulis rasakan ketika melakukan penelitian banyak bidan yang belum mengetahui undang-undang yang baru tentang kesehatan yakni Undang-Undang No. 36 tahun 2009, mereka masih mengacu pada undang-undang lama yakni Undang-Undang No. 23 tahun 1992. Kenyataan ini menggambarkan bahwa bidan dalam melakoni profesi medisnya ketinggalan mengetahui perkembangan hukum dan perubahan-perubahannya.

Dari sekian pasal-pasal dari KUHP yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku *abortus provocatus*, rata-rata hukuman yang mereka terima sangatlah ringan. Kemudian disahkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. UU No. 36 Tahun 2009. Sebagai Undang-Undang Kesehatan yang baru, mengatur aborsi dalam pasal 75 ayat 2, 3, 4 dan pasal 76 malah hadir sebagai pengecualian atas aborsi yang diatur dalam KUHP. Dari sinilah yang memicu semakin banyaknya kasus *abortus provocatus* dikalangan masyarakat.

2. Faktor sosiologis.

Kehamilan sebagai akibat hubungan seksual di luar ikatan perkawinan atau pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena sekarang ini anak muda Makassar belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tiru saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun

masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran “anak haram” seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber/penyebab aib tersebut, yakni dengan cara menggugurkan kandungannya (aborsi).

Kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah sebagai aib yang harus ditutupi sehingga tidak segan melakukan tindakan aborsi. Dalam keadaan seperti ini mereka rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah bagi para dokter peralatan pendukung untuk menyembunyikan kasus tindak pidana aborsi dan bersedia melakukan tindakan pengguguran kandungan. Dan bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling benar untuk menutupi sebuah rasa malu.

Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa atau sedikitnya mereka mengalami keadaan dimana rahim mereka rusak dan tidak akan dapat lagi memiliki anak (keturunan). Kesadaran masyarakatlah yang amat sangat diperlukan dalam menuntaskan masalah ini. Lemahnya pemahaman tentang hukum masyarakat memahami bahwa aborsi sebagai delik aduan, maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya, karenanya mereka yang tahu dengan masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib padahal kasus aborsi adalah delik umum, bukan delik aduan karena sama halnya dengan pembunuhan.

Kendala yang lain yang mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus *abortus provocatus* ialah, pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti aborsi. Karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur atau dibuang entah kemana.

3. Faktor ekonomi.

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bantu kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota keluarga mereka bertambah banyak.

4. Faktor sudah banyak anak.

Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosio-ekonomi di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Dari pada si anak yang akan dilahirkan nantinya menjadi terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.

5. Faktor pernikahan dini atau belum siap punya anak.

Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan yang mapan. Akibatnya, hidup mereka pas-pasan, hidup menumpang kepada orang tua atau mertua, saudara dan sebagainya. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurusnya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka

biasanya dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, dengan hilangnya janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tidak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai besar.

6. Kehamilan akibat perkosaan.

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.

Di Makassar bukan hal tidak tentu luput dari kasus pemerkosaan, pelakunya mulai dari kalangan remaja sampai orang tua sekalipun dan kebanyakan korbannya adalah gadis-gadis yang beranjak usia dewasa. Tentunya tidaklah sulit jika pelakunya adalah pemuda lajang, bisa saja di selesaikan secara adat dan kekeluargaan. Tetapi jika pelakunya adalah bapak-bapak yang sudah punya istri dan anak, tentu akan menjadi masalah kehormatan keluarga (*siri'*) dan menjadi sumber konflik antar keluarga sehingga korban perkosaan yang hamil terdorong untuk melakukan aborsi. Meskipun demikian kenyataannya aborsi akibat perkosaan di Makassar tidaklah banyak yang terungkap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi KUHP dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai hukum yang dasar putusan hakim belum terealisasi secara konsisten terhadap tindak pidana aborsi di Makassar, sehingga pada kenyataannya fenomena aborsi di Makassar masih menjadi problem di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang aborsi masih terjadi tumpang tindih sehingga lemah dalam penerapannya;
2. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi di Makassar yaitu:
 - a. Faktor dari hukum itu sendiri, yakni karena lemahnya hukum-hukum yang mengatur tentang aborsi, dalam hal ini penerapan sanksinya masih sangat ringan, selain itu juga kurang tegasnya lembaga penegak hukum dalam mengentaskan masalah aborsi di Makassar;
 - b. Faktor sosiologis, yakni karena pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar ikatan pernikahan dan masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan tentang aborsi, sehingga sosialisasi Undang-Undang Kesehatan belum menyentuh secara menyeluruh kepada masyarakat Makassar untuk mentaati undang-undang tersebut.

- a. Faktor ekonomi, yakni karena kemiskinan sehingga pengguguran kandungan (aborsi) dilakukan agar dapat mengimbangi kondisi ekonomi yang sangat membebani masyarakat miskin;
- b. Faktor sudah banyak anak;
- c. Faktor karena perkawinan diusia muda dan belum siap memiliki anak (keturunan);
- d. Faktor kehamilan akibat perkosaan (korban perkosaan).

Berdasarkan beberapa faktor di atas secara umum yang menjadi faktor utama terjadinya aborsi di Makassar adalah faktor pergaulan bebas dan faktor kemiskinan. Sementara faktor akibat korban perkosaan masih jarang terjadi.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas maka saran penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan agar konstruksi hukum yang mengatur tentang aborsi hendaknya mengatur lebih tegas, dan penerapan hukum atau undang-undang kesehatan lebih bersifat implementatif dan untuk itu perlu memberikan penyuluhan hukum kesehatan yang intensif kepada masyarakat.
2. Hendaknya generasi muda memaknai dan memahami pergaulan yang bersifat positif, dalam arti bergaul dengan bebas kepada siapa saja, akan tetapi tetap membatasi kebebasan yang dapat menimbulkan dampak negatif akibat pergaulan bebas itu. Lebih dalam lagi hendaknya masyarakat memahami bahwa aborsi bukanlah solusi untuk mengatasi kemiskinan, dalam hal ini hendaknya menempatkan pemahaman tentang Agama Islam sebagai *instrument* moral dalam kehidupan berkeluarga karena jelas dalam Al-Qur'an, Allah melarang membunuh anak karena takut miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakr Al-Suyuuthy, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahally dan Jalaluddin Abd Rahman. *Tafsir Al-Jalalain*. Surabaya: Al-Hidayah. t.th.
- Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Rad Al-Mukhtar 'Ala Al-Dur Al-Mukhtar*, jilid 2. Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Abi Muhammad Abdullah. *Al-Mughni*, jilid XII. Kairo: Hajar, t.th.
- Aminuddin, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Anshary A.Z., Hafiz dan Chuzaimah T. Yanggo. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Bertens, K. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Chisbiyah, Yayah dkk. *Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki*. Yogyakarta: PPPK-UG, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 2002
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Biomedical Issues, Islamic Perspective*. Terjemahan. *Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*. Jakarta: Mizan, 1997.
- Ensiklopedi Indonesia, *Abortus*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1980.
- Al-Ghazali. *Al-Wajiz*. Beirut: Daar Al-Ma'rifah. t.th.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Henry, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition: St. Paul Min West Publising Co.
- Herwanto. *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*, Pikiran Rakyat, 20 Desember 1997.

Hesti Armiwulan. *"Aborsi Ditinjau dari Segi Medis, Psikologi dan Hukum"*. Makalah yang disajikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), pada tanggal di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 29 Juli 2000.

[Http://www.lcl.cmu.edu/caae/Home/Forum/ethics.htm](http://www.lcl.cmu.edu/caae/Home/Forum/ethics.htm).

Lamintang, P.A.F., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Masdawati, "Abortus Provokatus Kriminalis, Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif." Makalah yang disampaikan pada Seminar Hukum Kesehatan di Universitas Tompotika, Luwuk Banggai, 14 Mei 2003.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1990.

_____, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1982.

Muhdiono. *Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan hanafi)*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah 2002.

Mutmainnah, Yulianti dan Afwah Mumtazah. *Menimbang Penghentian Kehamilan Tidak Diinginkan; Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Rahima, 2007.

Al-Naisabury, Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy. *Sahih Muslim*, jilid II. Beirut: Daar Al-Fikr, 1992.

Ninuk, Widyantoro. *Pengakhiran Kehamilan Tak Diinginkan yang Aman Berbasis Konseling*. Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan. 2003.

Novita, Dewi. *Aborsi menurut Petugas Kesehatan*. Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997.

- Pamwell, E.C. dan Homby A. S. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Bentara Antar Asia. 1992.
- Purnomo, Bambang. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberti, 1993.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Al-Wahbah, 1980.
- Quraish Shihab, M. *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata dan Tafsirnya*. Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997.
- _____. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____. *Secercah Cahaya Ilahi*. Jakarta: Mizan, 2007.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Shaddily, Hassan dan Echols. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Saumiman, Saud. *Aborsi, Pro dan Kontra? Bagaimana kita Menjawabnya*, www.kabarindonesia.com, 14 November 2006.
- SCJ, Kusmaryanto. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Setyowati, Sri, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. t.p: Jakarta. 1976.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

- Soge, P. *Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi di Indonesia*. Yogyakarta. 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supriyadi, "Politik Hukum Kesehatan terhadap Pengguguran Kandungan", Makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah, "Aborsi Dari kajian Ilmu Politik Hukum" (Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana), Bagian Hukum Pidana, FH-UAJY, Yogyakarta: 2 Juli 2002.
- Utrecht, *Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987.
- Wati, *Aborsi di Indonesia*, Suara Merdeka, 27 Februari 2000.
- Widi, Artana. Suryono Ekotama, Artu Harum dan ST Pudji. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. 2001.
- Widodo, *Aborsi dalam Perdebatan Ulama*, Suara Merdeka: Jakarta 5 Desember 1997.
- Winarno, Surahmad. *Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: PN. Tarsito, 1975.
- Yayasan Pengembangan Pedesaan, *Kesehatan Reproduksi*, Malang: Danar Wijaya, 1997.